

## Desentralisasi Pendidikan di Tingkat Kabupaten

Made Pidarta

**Abstract:** Decentralization of education on district (Kabupaten) is an effort to substitute the centralized system. By this decentralization, the program, process and assessment of educational activities will meet the district's need to develop its human resources, regional growth and other needs based on its own geographical and cultural characteristics. Institution most responsible to the decentralization is the school in cooperation with parents and community. The education officers serve as facilitators, supervisors, and communicators to the superordinates.

**Kata kunci:** desentralisasi, pendidikan, kabupaten.

Reformasi di Indonesia sudah bergulir dari sistem sentralisasi ke sistem desentralisasi. Segala sektor mengarah ke desentralisasi. Sektor-sektor itu dimotori oleh sektor pemerintahan, yaitu pemerintahan terpusat berubah menjadi pemerintahan desentralisasi di tingkat kabupaten/kota. Salah satu konsekuensi dari perubahan sifat pemerintahan ini adalah berubahnya sifat pendidikan, yaitu dari sentralisasi ke desentralisasi di tingkat kabupaten atau kota.

Sharpe (1994) menyebut proses transisi dari sentralisasi ke desentralisasi dengan istilah devolusi (*devolution*). Katanya lebih lanjut, devolusi membutuhkan sikap yang lebih responsif terhadap keadaan dan kebutuhan lingkungan, lebih fleksibel dalam menangani perubahan lingkungan yang cepat, dan mengajar belajar yang lebih baik. Sikap responsif terhadap

---

Made Pidarta adalah Ketua Program Studi Magister Manajemen Pendidikan di Universitas Negeri Surabaya.

kebutuhan lingkungan dan fleksibel dalam menangani perubahan hanya berhasil dengan baik bila lingkungan itu tidak terlalu luas. Ini berarti pendidikan yang ditangani perlu dibatasi wilayahnya. Wilayah satu kabupaten dipandang memadai. Desentralisasi di tingkat kabupaten ini dapat disebut devolusi sebagai transisi ke desentralisasi di tingkat sekolah.

Peningkatan penanganan pendidikan pada wilayah yang terbatas ini sangat mungkin dilakukan, seperti pengembangan demokratisasi, kerjasama, profesionalisasi sumber daya manusia (SDM), pengembangan lembaga, dan kepemimpinan pendidikan (Blasé & blasé, 1999). Demikian pula dengan visi pendidikan masa kini yang dikemukakan oleh Thoha (1999) seperti orientasi pelanggan, demokrasi, informasi teknologi, dan desentralisasi teknologi itu sendiri lebih mungkin diwujudkan dibanding dengan pada sistem sentralisasi.

Huda (1999) menuliskan tiga model desentralisasi, yaitu desentralisasi pada tingkat lembaga pendidikan, pengurangan administrasi pusat ke daerah atau sekolah, dan inovasi kurikulum. Pada masa transisi, desentralisasi di tingkat lembaga atau sekolah belum dapat dilaksanakan. Yang dapat dilaksanakan adalah desentralisasi daerah/wilayah, yang berarti sebagian urusan administrasi pusat dipindahkan ke daerah.

Berdasarkan uraian di atas, mudah dipahami bahwa desentralisasi pendidikan di tingkat kabupaten merupakan desentralisasi transisi, karena kondisi pendidikan kita belum memungkinkan dilakukannya desentralisasi yang murni, yaitu di tingkat lembaga/sekolah.

#### **KEWAJIBAN PENDIDIKAN PUSAT DAN PENDIDIKAN KABUPATEN**

Desentralisasi pendidikan di setiap negara, baik desentralisasi di tingkat wilayah maupun di tingkat lembaga, tidaklah berarti segala urusan pendidikan dilakukan oleh wilayah atau lembaga itu sendiri, melainkan masih tetap terkait dengan kegiatan-kegiatan pendidikan di pemerintah pusat. Kalau pendidikan wilayah tidak ada kaitannya sama sekali dengan pendidikan pusat dapat terjadi kesimpangsiuran arah pendidikan dalam satu bangsa. Hal seperti itu memberi peluang bagi perpecahan suatu bangsa.

Di Victoria, Australia, misalnya, hasil penelitian Pidarta (1995) menunjukkan bahwa, walaupun negara itu telah memakai sistem desentralisasi murni, yaitu di tingkat sekolah, pendidikan di sekolah ini tetap berkaitan dengan konsep pendidikan yang dibuat oleh pemerintah federal atau pusat. Dalam hal ini pemerintah federal hanya memberikan rambu-rambu atau



kerangka pendidikan, sementara sekolah bertugas mengisi rambu-rambu itu sesuai dengan kondisi masing-masing. Namun karena desentralisasi itu, ketika itu, masih bersifat transisi, maka penentuan buku-buku pegangan masih dimusyawarahkan antarguru bidang studi se negara bagian Victoria. Buku-buku tambahan boleh dipilih oleh sekolah masing-masing.

Di Indonesia sepatutnya seperti itu pula. Pemerintah pusat atau Departemen Pendidikan Nasional berkewajiban memberi rambu-rambu untuk diisi oleh petugas pendidikan di masing-masing kabupaten atau kota. Secara rinci rambu-rambu yang dimaksud antara lain meliputi bidang studi yang wajib diberikan karena mendukung persatuan dan kesatuan bangsa, kriteria prestasi lulusan secara minimal untuk semua jenjang pendidikan, konsultasi umum kepada petugas-petugas pendidikan kabupaten, pengawasan umum terhadap pelaksanaan pendidikan, dan penilaian laporan tentang pendidikan setiap kabupaten.

Sementara itu kewajiban di tingkat kabupaten antara lain adalah menciptakan program pendidikan yang tepat, mengusahakan sumber-sumber pendidikan, mengusahakan sarana dan prasarana pendidikan, menggalang kerjasama dengan masyarakat, dan menciptakan proses pendidikan secara konsumtif agar menghasilkan keluaran dan hasil yang memadai.

#### **PROGRAM PENDIDIKAN**

Program pendidikan di tingkat kabupaten harus memberi manfaat sebesar-besarnya kepada penduduk, khususnya anak, pembangunan, dan lingkungan di wilayah itu. Hal itu disebabkan sekolah merupakan agen pembaharuan masyarakat. Sekarang masyarakat kita sedang membangun dalam banyak sektor. Itulah sebabnya pembangunan perlu dikaitkan dengan program pendidikan di samping program pengembangan peserta didik itu sendiri.

Dalam kondisi ekonomi yang masih terpuruk seperti sekarang, tampaknya hampir semua orang setuju kalau pengembangan peserta didik dalam hal memberdayakan diri untuk meningkatkan ekonomi daerah diutamakan. Untuk itu, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) perlu diperbanyak, sedang Sekolah Menengah Umum (SMU) dikurangi. Hal itu dimaksudkan agar jauh lebih banyak tenaga menengah dibandingkan tenaga ahli. Menurut pengamatan, perbandingan akan kebutuhan tenaga kerja adalah seperti itu. SMU disiapkan ke perguruan tinggi, jadi tidak perlu didirikan banyak. Cara ini sekaligus akan dapat mengurangi pengangguran intelektual.

Begitu pula halnya dengan kelas-kelas akhir SLTP. Sebagai akhir dari wajib belajar 9 tahun, siswa SMTP perlu banyak dibekali kemampuan atau keterampilan kerja agar lulusan mampu mencari nafkah sendiri. Sistem pendidikan ganda yang sedang digalakkan sekarang perlu ditingkatkan karena manfaatnya sangat besar bagi keberhasilan belajar peserta didik. Perusahaan-perusahaan di Kabupaten perlu menyadari diri atau disadarkan akan pentingnya bantuan mereka terhadap pendidikan anak-anak.

Selain program pengembangan berekonomi, tidak kalah pentingnya adalah program pengembangan moral dan mental para peserta didik. Hill (1991) menginginkan pengajaran nilai-nilai diseimbangkan dengan pengajaran pengembangan otonomi atau kemandirian dalam menghadapi kehidupan. Woff (1991) menginginkan pengajaran *humanities*, yaitu pengembangan semua potensi peserta didik, termasuk sikap dan kepribadian melalui seluruh materi pelajaran yang dipelajari. Gordon (1991) juga sepakat dengan Woff bahwa pengajaran nilai-nilai atau *humanities* diberikan melalui bidang-bidang studi yang dipelajari.

Pendapat ketiga ahli tersebut sangat tepat terutama untuk bangsa Indonesia pada masa sekarang. Sehari-hari, peserta didik membuat huru-hara di jalanan, berkelahi, minum minuman keras, beberapa sudah ketagihan narkoba, dan berperilaku negatif lainnya. Perilaku negatif ini memberi peluang besar bagi mereka melaksanakan korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) kalau sudah dewasa. Gejala seperti itu perlu dibendung lewat pendidikan moral dan mental seperti disebutkan di atas. Caranya pun tidak cukup melalui bidang studi agama dan PPKn serta budi pekerti, melainkan perlu diintegrasikan pada semua bidang studi.

Program berikutnya yang perlu diadakan di sekolah adalah hidup bersama secara damai. Dalam era globalisasi, kehidupan seperti itu memang diperlukan, di samping kemampuan berkompetisi. Pada zaman seperti ini batas-batas negara seolah-olah kabur, yang mengharuskan masyarakatnya dapat hidup bersama secara tenteram, terlepas dari perbedaan bangsa, suku, ras, agama, dan bahasa. Banyak pergolakan di dunia yang didasari oleh kefanatikan perbedaan-perbedaan di atas. Di Indonesia juga terjadi pergolakan semacam itu. Salah satu cara menanggulangi adalah melalui pendidikan hidup bersama secara damai, yang dapat dilakukan melalui kerjasama dalam banyak hal pada pelajaran-pelajaran di sekolah.

Program lainnya yang perlu dikembangkan adalah pelestarian lingkungan, seperti pengembangan sikap mencintai lingkungan yang alami,



bertanggung jawab terhadap pelestariannya, serta menghindari dan memberantas polusi. Pendidikan ini berguna untuk mengurangi dan memberantas pencemaran lingkungan yang sudah mengkhawatirkan sekarang. Pendidikan itu pun dapat dilakukan lewat semua bidang studi, tanpa perlu membuat bidang studi baru.

Program-program utama yang terakhir adalah program pembangunan masyarakat. Seperti telah dipaparkan, sekolah adalah agen pembaharuan masyarakat. Sudah selayaknya sekolah beserta para peserta didik menjadi pelopor pengembangan/pembangunan masyarakat pendukungnya. Hal ini dapat dilakukan terutama melalui kerjasama yang erat antara sekolah dan masyarakat. Tema-tema pelajaran banyak diambil dari masyarakat, yang bertalian dengan perbaikan dan pembangunan masyarakat.

#### KERJASAMA SEKOLAH DENGAN MASYARAKAT

Untuk mewujudkan cita-cita pendidikan yang ideal di setiap kabupaten, dibutuhkan kerjasama yang erat antara sekolah dengan masyarakat di kabupaten itu. Masyarakat di sini cukup diwakilkan kepada tokoh-tokoh masyarakat dan wakil-wakil orangtua siswa yang menaruh perhatian terhadap pendidikan. Mereka bisa diwujudkan dalam satu wadah, misalnya dengan nama Badan Kerjasama Sekolah dengan Masyarakat disingkat BKSM.

Futrell (1993) menyebutkan pendidikan modern dan masa mendatang harus lebih meningkatkan kerjasama dengan orang tua, legislatif, gubernur, dan masyarakat dalam proses perubahan. Anggota DPR daerah dan gubernur, kalau mereka menaruh perhatian besar terhadap pendidikan, dapat saja dilibatkan dalam BKSM sebagai tokoh masyarakat. Tokoh lain yang perlu dilibatkan adalah para pemimpin agama, usahawan, pemimpin adat, dan sebagainya.

Karena desentralisasi baru pada tingkat kabupaten, maka setiap kabupaten atau kota cukup memiliki satu BKSM saja. BKSM inilah yang menjadi mitra (*partner*) sekolah dalam menangani pendidikan di semua jenjang dan jenis sekolah pada kabupaten itu. Cara seperti ini akan menghasilkan satu arah pikiran dan tindakan pada masing-masing kabupaten dalam mempertahankan dan meningkatkan kualitas maupun kuantitas produk pendidikan.

Sebagai konsekuensi desentralisasi, hasil penelitian Gamage (1994) mengharuskan pendidikan dapat meningkatkan dan melaksanakan pengaruh dan otoritas sekolah, memberi otonomi lebih besar, fleksibel, akuntabel,

membuat lingkungan belajar yang lebih baik, dan kepala sekolah tidak hanya dapat melaksanakan kepemimpinan di sekolah, tetapi juga di masyarakat pendukung sekolah. Meningkatkan pengaruh, otoritas, dan otonomi sekolah memang merupakan faktor-faktor yang penting dalam melakukan desentralisasi. Tanpa faktor-faktor itu sekolah akan tetap bergantung pada pihak lain. Adanya tuntutan fleksibilitas disebabkan desentralisasi masih transisi, masih belum mantap, dan masih mencari-cari model yang tepat. Namun akuntabilitas dan lingkungan belajar yang baik tetap dituntut agar proses belajar berjalan lancar dan misi pendidikan dapat diukur dan dinilai secara objektif oleh semua pihak yang berkepentingan, termasuk oleh masyarakat setempat. Itulah sebabnya kepala sekolah dituntut pula dapat memimpin masyarakat di samping memimpin sekolah, karena masyarakat merupakan teman seperjuangan dalam menangani pendidikan pada segala aspeknya.

Bertalian dengan peranan kepala sekolah, Hallinger dan Heck (Blasé & blasé, 1999) mengatakan bahwa pada masa sekarang peranan kepala sekolah lebih luas, mentransformasi kepemimpinan, kepemimpinan partisipatif, dan pengambilan keputusan desentralisasi. Tuntutan akan kepemimpinan lebih luas sama dengan penjelasan di atas bahwa kepala sekolah juga memiliki kewajiban untuk mempengaruhi atau memimpin BKSM. Melakukan kepemimpinan partisipatif maksudnya adalah memberi kesempatan kepada personalia pendidikan, termasuk anggota BKSM, untuk ikut memikirkan masalah-masalah yang penting sebelum diputuskan bersama. Ini berarti ada transformasi kepemimpinan, yaitu memberikan sebagian wewenang kepemimpinan kepada orang lain. Dengan demikian, keputusan-keputusan tidak semua berada di tangan kepala sekolah, melainkan untuk kasus-kasus tertentu dapat dilakukan oleh personalia pada unit-unit kerja yang melayani kasus itu. Inilah yang dimaksud dengan pengambilan keputusan desentralisasi.

Kepemimpinan kepala sekolah yang lebih luas bertujuan menggalang kerjasama yang erat dengan masyarakat, termasuk kalangan bisnis. Dalam mewujudkan dan mempertahankan kerjasama ini kepala sekolah perlu menjadi pelopor, berinisiatif, dan kreatif mengadakan kegiatan. Hal itu disebabkan sekolah atau kepala sekolah paling paham akan manfaat kerjasama itu. Karena itu, sudah sepatutnya kepala sekolah menggugah dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pendidikan di sekolah. Kepala sekolah perlu memberikan informasi yang rasional serta melakukan kerjasama ke-



pada masyarakat. Dengan cara ini diharapkan kesadaran masyarakat mulai tumbuh untuk ikut berpartisipasi dalam pendidikan putra-putrinya.

Tugas kepala sekolah yang lain yang tidak kalah pentingnya adalah mencari sumber-sumber pendidikan termasuk dana tambahan agar mencukupi kebutuhan pendidikan. Melengkapi sumber-sumber pendidikan seperti sarana dan prasarana, buku-buku tambahan, narasumber, perlengkapan laboratorium, bengkel kerja, kebun percobaan, dan sebagainya merupakan tugas bersama sekolah dengan BKSM, yang dipimpin oleh kepala sekolah. Kepala sekolah menjadi penggerak utama, penggugah kegiatan, dan pemacu tindakan. Sementara itu, baik sekolah maupun BKSM dapat saja berupaya sendiri-sendiri untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut.

Peran utama BKSM adalah ikut merumuskan kurikulum lokal dan mengontrol proses pendidikan, di samping peran-peran yang lain seperti ikut menentukan kebijakan pendidikan, program pendidikan, dan mencari sumber-sumber pendidikan seperti telah diutarakan di atas. Peranan BKSM dalam merumuskan kurikulum lokal sangat penting, lebih-lebih dalam sistem pendidikan desentralisasi yang sebagian besar pengajarannya menyesuaikan diri dengan kebutuhan pembangunan, tenaga kerja, dan kondisi daerah setempat. Hal itu disebabkan para anggota BKSM paling banyak tahu dan paling berkepentingan akan kebutuhan-kebutuhan itu. Itulah sebabnya kurikulum lokal sebagian besar ditentukan oleh BKSM, yang sudah tentu atas kesepakatan dengan para personalia sekolah.

Sebagai badan yang ikut bertanggung jawab terhadap pendidikan, BKSM juga berkewajiban mengontrol proses pendidikan di sekolah. Kontrol itu dapat dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan terhadap peserta didik, guru, dan kepala sekolah. Kontrol juga dapat dilakukan melalui pengamatan secara langsung proses belajar di sekolah, walaupun bukan sebagai supervisor. Hal terakhir ini dimungkinkan mengingat pendidikan yang modern membuka pintu lebar-lebar terhadap orang tua atau tokoh masyarakat yang berniat mengunjungi sekolah. Mereka dapat berkunjung ke sekolah secara insidental. Warga sekolah, baik guru-guru maupun para peserta didik, akan menerima mereka secara terbuka.

#### **PERAN KANTOR PENDIDIKAN**

Di kabupaten atau kota ada dua jenis kantor pendidikan, yaitu kantor pendidikan di tingkat kabupaten dan kantor pendidikan di tingkat kecamatan. Kedua kantor ini sudah tentu terlibat dalam pendidikan di kabupaten ber-

sangkutan, namun perannya terbatas, tidak saling menentukan seperti halnya dengan sekolah dan BKSM. Peran yang dimaksud adalah sebagai fasilitator pertemuan, sebagai supervisor, dan menangani urusan-urusan kedinasan atas.

Sejalan dengan uraian di atas, tampaknya akan diperlukan berkali-kali pertemuan dan berbagai macam pertemuan dalam rangka merencanakan, menelaah program, dan berdiskusi tentang masalah-masalah tertentu untuk memajukan pendidikan. Pertemuan-pertemuan seperti itu difasilitasi oleh kantor pendidikan.

Sebagai supervisor, pejabat di kantor pendidikan kabupaten dan kecamatan akan sering turun ke sekolah-sekolah dalam melakukan pembinaan kepada guru. Hasil penelitian Blasé & blasé (1999) menunjukkan strategi untuk memajukan profesi guru adalah memberi sugesti, memberi balikan, memberi model atau contoh mengajar, menggunakan *inquiry* dengan pertanyaan-pertanyaan pancingan serta nasihat yang bersungguh-sungguh, dan memberi hadiah. Hasil penelitian ini perlu dicoba oleh supervisor di sekolah-sekolah, dan kalau berhasil patut dipegang dan dipertahankan.

Hasil penelitian di atas dilengkapi hasil penelitian Maxwell (Sharpe, 1994) yang menyatakan bahwa tidak ada pendekatan tunggal yang sukses dalam pengembangan staf; yang penting adalah dukungan kepala sekolah dan iklim belajar/bekerja yang kondusif. Selain itu, perlu disediakan waktu penuh untuk berdiskusi secara terbuka. Dukungan sekolah, kelompok, dan pemimpin daerah amat penting dalam menyukseskan pengembangan serta implementasi pengembangan staf. Butir-butir penting yang dapat dimanfaatkan oleh supervisor dari hasil penelitian itu adalah perlu mengembangkan berbagai pendekatan dalam membina guru-guru, menciptakan iklim kerja yang kondusif, memberi kesempatan untuk berdiskusi, dan selalu mengadakan kerjasama, baik dengan sekolah maupun dengan BKSM.

Hasil penelitian Griffith (1999) yang tampaknya lebih mengarah kepada kepala sekolah yang juga merupakan supervisor di sekolah itu mencatat hal berikut. Kepala sekolah yang efektif menaruh perhatian terutama kepada koordinasi antarguru kelas, memperhatikan kebutuhan orang tua siswa dan masyarakat, dan menjembatani lingkungan luar dan sekolah. Hasil penelitian itu yang dapat dipetik oleh supervisor kantor-kantor pendidikan adalah pentingnya menggalang kerjasama antarguru kelas.

Kepatutan kerjasama antarguru kelas tersebut diperkuat oleh hasil penelitian Pounder (1999) yang mengatakan bahwa guru yang bekerja



secara tim memberikan hasil yang lebih tinggi secara berarti dibandingkan dengan nontim dalam hal berbagai macam keterampilan kerja, pengetahuan tentang siswa, pertumbuhan kepuasan kerja, komitmen terhadap profesi, kerjasama dan efektivitas kelompok, pertumbuhan motivasi kerja intrinsik, dan pembangkitan minat guru untuk bekerja secara sungguh-sungguh. Pedoman kerja lain yang dapat dimanfaatkan oleh supervisor dalam melaksanakan tugasnya, yang masih bertalian dengan tim guru di atas, adalah upaya menekan atau meningkatkan otonomi guru, hak guru, dan tanggung jawabnya terhadap sesama guru (Westheimer, 1999).

Terdah sejumlah konsep yang dapat dipegang oleh para supervisor dari kantor-kantor pendidikan kabupaten ataupun kecamatan. Konsep-konsep ini perlu dicermati dan dipahami sebelum dicoba dalam praktik supervisi. Sudah tentu para supervisor dapat menolak salah satu atau beberapa konsep ini jika ternyata tidak tepat dilaksanakan di lapangan. Para supervisor juga memiliki kewajiban untuk mencari sendiri teori-teori baru tentang supervisi.

Tugas kantor pendidikan yang lain adalah menangani urusan kedinasan ke atas, baik ke kantor wilayah pendidikan maupun ke departemen pendidikan. Hal ini dilakukan agar sejalan dengan struktur pendidikan yang berlaku di Indonesia.

#### **PENDIDIKAN DI KABUPATEN SEBAGAI SATU UNIT**

Desentralisasi pendidikan di tingkat kabupaten berarti semua pendidikan pada setiap kabupaten dipandang sebagai satu kesatuan. Artinya, tiap kabupaten memiliki kesatuan-kesatuan pendidikan sendiri-sendiri yang diwarnai oleh keadaan kabupaten bersangkutan. Kesatuan pendidikan itu pada umumnya berbeda satu dengan yang lain, tetapi ada kemungkinan beberapa kesatuan pendidikan akan sama atau mirip manakala keadaan kabupaten-kabupaten itu sama atau mirip.

Tiap kesatuan pendidikan dalam satu kabupaten akan mencakup semua jenjang pendidikan mulai dari TK sampai dengan SMU dan SMK, dan akan mencakup juga semua jenis pendidikan, seperti sekolah umum, sekolah kejuruan, dan sekolah keagamaan, yang jumlahnya mungkin sangat bervariasi antara satu kabupaten dan kabupaten lainnya. Sebagai satu kesatuan pendidikan ia akan menjadi suatu unit pendidikan yang otonom. Artinya, sebagian besar program, proses belajar, fasilitas belajar, sumber-sumber pendidikan, dan kebijakan pendidikan ditentukan sendiri oleh para

pendidik di kabupaten itu, dengan catatan tetap mengikuti rambu-rambu umum yang diberikan oleh pemerintah pusat.

Tujuan utama desentralisasi pendidikan di tingkat kabupaten ini adalah untuk: memenuhi kebutuhan tenaga kerja sesuai dengan lapangan kerja yang sudah ada atau lapangan kerja yang akan diadakan di kabupaten itu; memenuhi kepentingan masyarakat atau orang tua akan kebutuhan/pengembangan bakat dan minat putra-putri mereka; membantu mengembangkan wilayah kabupaten terutama dalam bidang bisnis; menjaga kelestarian lingkungan alam dari pencemaran atau polusi yang kini semakin meningkat; menyesuaikan pendidikan dengan ciri geografis di kabupaten itu; menyesuaikan pendidikan dengan ciri kebudayaan, adat-istiadat, dan norma-norma masyarakat setempat.

Yang memegang peranan utama dalam mengembangkan dan menangani pendidikan di kabupaten ini adalah personalia sekolah dan para anggota BKSM. Sementara itu, kantor pendidikan kabupaten dan kecamatan hanya bertindak sebagai fasilitator, supervisor, dan penghubung urusan kedinasan ke atas.

Mekanisme pengembangan pendidikan dalam satu kesatuan di kabupaten adalah sebagai berikut. Mula-mula diadakan rapat para kepala sekolah dengan para anggota BKSM tentang misi dan program pendidikan yang dipantau oleh kepala kantor pendidikan. Musyawarah di atas dilanjutkan pada setiap jenjang pendidikan agar misi dan programnya cocok dengan jenjangnya masing-masing. Begitu pula halnya dengan jenis-jenis pendidikan. Dalam musyawarah di atas diupayakan agar visi, misi, dan target pendidikan sejalan dari SD, SLTP sampai dengan SMU dan SMK. Selanjutnya diadakan musyawarah guru-guru kelas untuk SD se kabupaten tentang tata kerja mereka. Begitu pula halnya dengan musyawarah antarguru bidang studi di SLTP, di SMU, dan di SMK tentang tata kerja yang akan mereka laksanakan. Pertemuan-pertemuan itu difasilitasi oleh kantor pendidikan di kabupaten.

Beberapa hal tentang mekanisme pengembangan pendidikan tersebut di atas perlu diberi penjelasan sebagai berikut. Pemantauan yang dilakukan oleh kepala kantor pendidikan kabupaten dan kecamatan terbatas pada tugasnya sebagai fasilitator, supervisor, dan hubungan dinas ke atas. Kalau pembicaraan bertalian dengan fasilitas pertemuan maka pejabat-pejabat kantor ini akan ikut berbicara. Kalau pembicaraan bertalian dengan upaya meningkatkan profesi guru dan tata kerja guru, maka pejabat-pejabat ini



akan ikut berbicara. Demikian juga dengan pembicaraan-pembicaraan yang bersangkutan dengan tugas kedinasan ke pihak pejabat yang lebih di atas seperti kantor wilayah di tingkat propinsi dan kantor departemen pendidikan di pusat, mereka akan ikut terlibat.

Setiap jenjang pendidikan memang memiliki materi sendiri-sendiri terutama tentang kedalaman pembahasannya. Hal seperti ini juga akan terjadi pada setiap jenis pendidikan. Ini yang membuat adanya keharusan para guru di tiap-tiap pendidikan mengadakan musyawarah sendiri-sendiri, dengan catatan mereka sebelumnya akan bertemu dahulu untuk membuat agar program-program pada jenjang pendidikan tidak tumpang tindih, melainkan maju berkelanjutan secara bersambung. Pembicaraan untuk keperluan ini dapat juga dilakukan pada pertemuan-pertemuan awal bersama para anggota BKSM.

Pertemuan untuk membahas tata kerja para guru, baik guru kelas maupun guru bidang studi, memang merupakan satu hal yang biasa dan patut dilakukan oleh guru-guru dalam rangka meningkatkan proses belajar mengajar. Begitu pula dalam upaya memperbaiki kurikulum, memperbaharui materi pelajaran, alat-alat belajar, dan sebagainya semuanya membutuhkan pertemuan secara rutin.

Sepererti telah dipaparkan sebelumnya, yang memegang peranan penting dalam pendidikan sistem desentralisasi tingkat kabupaten adalah sekolah dan BKSM. Walaupun kedua badan atau lembaga itu memegang peranan penting, yang banyak tahu tentang pendidikan, manfaat pendidikan, dan cara-cara menanganinya adalah sekolah. Atas dasar itu, sekolah yang dalam hal ini para kepala sekolah di kabupaten itu, harus menjadi motor penggerak utama dalam merealisasikan desentralisasi pendidikan di kabupaten. Para kepala sekolah, melalui musyawarah, dapat menyebarkan informasi ke masyarakat agar masyarakat paham akan perkembangan sistem pendidikan terakhir di Indonesia. Melalui penyebaran angket para kepala sekolah akan dapat menemukan anggota masyarakat yang berminat akan perbaikan pendidikan. Para tokoh, termasuk wakil-wakil orang tua siswa, direkrut untuk menjadi anggota BKSM; mereka ini disebut dengan istilah *stake holder*.

Itulah gambaran singkat tentang pendidikan terdesentralisasi di tingkat kabupaten atau kota, suatu program dan proses pendidikan sebagai satu kesatuan yang penanganannya dilakukan secara otonom. Pemegang peran utama adalah tiga serangkai, yaitu sekolah, masyarakat, dan orang tua siswa sesuai dengan harapan Undang-Undang Pendidikan No. 2 Tahun 1989.

## PENUTUP

Pada masa reformasi sekarang banyak hal mengalami perubahan, termasuk dunia pendidikan. Disadari sistem sentralisasi pendidikan banyak kelemahannya, sistem itu perlu diubah menjadi sistem desentralisasi. Namun desentralisasi penuh pada setiap sekolah belum dapat dilaksanakan karena banyak kendala, terutama keterbatasan sumber daya manusia. Oleh karena itu, diusulkan desentralisasi pada tingkat kabupaten atau kota agar sejajar dengan desentralisasi pemerintahan pada tingkat itu pula.

Keuntungan dilakukannya desentralisasi pendidikan pada tingkat kabupaten adalah produk pendidikan lebih tepat-guna, baik mutu maupun jumlahnya. Artinya, lulusan sesuai dengan keinginan anak dan orang tua itu sendiri di masyarakat pendukung pendidikan sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja dan pengembangan daerah setempat, dan sesuai pula dengan kondisi geografis serta budaya di kabupaten itu.

Yang memegang peranan utama dalam pengembangan dan penanganan pendidikan kabupaten adalah para personalia sekolah dan tokoh masyarakat serta wakil-wakil orang tua siswa. Mereka merencanakan program, melengkapi sumber-sumber pendidikan, dan mengontrol proses pendidikan, sedangkan yang melaksanakan pendidikan adalah sekolah yang dibantu oleh narasumber dari masyarakat.

Ini berarti setiap kabupaten sangat mungkin memiliki program pendidikan yang berbeda karena kondisinya tidak mesti sama. Namun pendidikan di semua kabupaten tetap mempertahankan keutuhan bangsa, karena program-program mereka dibatasi oleh rambu-rambu yang dibuat oleh pemerintah pusat.

## DAFTAR RUJUKAN

- Blasé, J. & Blasé, Jo. 1999. Principals' Instructional Leadership and Teacher Development. *Educational Administration Quarterly*, XXXV (3).
- Futrell, M.H. 1993. K-12 Educational Reform: A View from the Trenches. *Educational Record*, 74 (3): 9.
- Gamage, D.T. 1994. The Evolution of School Councils in Australia. *The Practising Administrator*. 16 (1): 40.
- Gordon, P. 1991. Approaching the Humanities. Dalam P. Gordon (Ed), *Teaching the Humanities*. London: The Woburn Press.
- Griffith, J. 1999. The School Leadership/School Climate Relation. *Educational Administration Quarterly*, 35 (2): 268.



- Hill, B.V. 1991. *Values Education in Australian Schools*. Victoria: Australia Council for Educational Research.
- Huda, N. 1999. Desentralisasi Pendidikan: Pelaksanaan dan Permasalahannya. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5 (17): 16.
- Pidarta, M. 1995. *SD dan Teknik-teknik Mengajar pada Beberapa Sekolah Victoria Australia*. Laporan penelitian tidak diterbitkan. Surabaya: Lembaga Penelitian IKIP Surabaya.
- Pounder, D.G. 1999. Teacher Teams. *Educational Administration Quarterly*, XXXV (3): 317.
- Sharpe, F.G. 1994. Devolution: Where are We Now? How Far Should We Go? *The Practising Administrator*, 16 (1): 4.
- Huda, M. 1999. Desentralisasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan*, 5 (17): 4-5.
- Westheimer, J. 1999. Communities and Consequences. *Educational Administration Quarterly*, 35 (1): 71.
- Woff, R. 1991. The Scope of the Humanities. Dalam P. Gordon (Ed.). *Teaching the Humanities*. London: The Woburn Press.